

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Ditilik dari hasil wawancara dan pemeriksaan di lapangan, ada beberapa alasan mengapa suara organisasi buruh tidak bisa memenangkan Obon Tabroni dan komplotannya pada Pilkada tingkat provinsi Rezim Bekasi tahun 2017, yaitu:

Pertama, tidak adanya kekompakan antar serikat dagang di Pemerintahan Bekasi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ideologi antar serikat buruh, khususnya antar pimpinannya. Perbedaan penilaian dan pemikiran ini muncul dari perpecahan besar dalam perolehan suara Obon pada saat pemungutan suara. Selain itu, para ahli dalam pengambilan keputusan tingkat provinsi pada tahun 2017 memiliki afiliasinya sendiri yang tidak dapat dikontrol atau dihalangi oleh siapa pun. Para pekerja menunjukkan pendekatan psikologis terhadap politik pada Pilkada 2017, dengan keterikatan emosional pada partai atau kelompok politik dan orientasi terhadap kandidat. Kemungkinan adanya sound bombing atau pengkhianatan dari pihak FSPMI sendiri menjadi faktor tambahan. Hal itu diungkapkan Obon kepada penciptanya saat pertemuan. Menurut Obon, beberapa anggotanya justru sempat berbohong saat proses pencoblosan. Karena kendala koordinat pemohon yang bertolak belakang, suara FSPMI hilang sekitar 2-3%. Karena hal ini tidak hanya menyebabkan kurangnya keputusan yang menguntungkan pasangan Obon dibandingkan pertandingan pesaing lainnya.

Kedua, belum adanya pengalaman politik buruh di Indonesia, khususnya di Pemerintahan Bekasi. Masih banyak buruh yang belum memiliki bidang kekuatan

yang serius untuk memiliki wawasan, terutama bagaimana memahami keterkaitan persoalan peraturan perundang-undangan dengan kepentingan dan nasib hidup buruh. Kepentingan buruh masih belum sepenuhnya menentukan perilaku politik sebagian besar pemilih buruh; Sebaliknya, ada faktor lain seperti faktor sosiologis dan psikologis serta pilihan rasional. Hal yang normal bagi sebagian besar spesialis adalah pergi bekerja, kembali ke rumah untuk beristirahat, kemudian kembali bekerja keesokan harinya, dan seterusnya. Karena sebagian besar waktumereka dihabiskan di pabrik pengolahan untuk bekerja dan mereka memerlukan pemahaman tentang pentingnya isu-isu legislatif, perhatian mereka mengenai kerjasama politik sangat rendah dan secara umum akan diabaikan.

Selain alasan-alasan di atas, pencipta juga menduga ada faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya Obon Tabroni sebagai pendatang bebas yang dijunjung oleh para buruh, antara lain: Pertama, tidak adanya ketenaran Obon Tabroni di kalangan buruh. perseorangan Pemerintahan Bekasi. Obon Tabroni tidak terlalu terkenal di kalangan warga Kabupaten Bekasi, sehingga masyarakat umumnya akan memilih pasangan yang sudah mereka kenal. Masyarakat Rezim Bekasi pasti melihat pertandingan kompetitor dengan mempertimbangkan unsur humanistik. Sebab, seperti halnya Sadudin yang menjabat Bupati pada 2007 hingga 2012, dan Neneng yang menjabat Bupati sebelumnya, masyarakat lebih mengetahui latar belakang dan hasil karyanya.

Kedua, permasalahan perundang-undangan tunai di kalangan buruh dan masyarakat daerah di Kabupaten Bekasi. Permasalahan uang tunai pemerintah dan peredaran barang-barang kebutuhan pokok selama pemilu masih merupakan bidang

kekuatan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Masyarakat dan pegawai lebih memilih pasangan calon yang paling banyak menerima sumbangan atau sembako sebagai imbalan atas suaranya. Bahkan ada pula yang terang-terangan memberikan uang tunai kepada pemilih dengan alasan sebagai pengganti uang makan, uang kerja, uang transportasi, dan uang tunai. Modus politik uang di negeri ini juga beragam. Ada pula yang memberi dengan cara halus seperti penyediaan fasilitas umum, pembagian sembako, hingga pembagian kaos. mendukung. Para pemilih berpikir lebih situasional dan akan memilih pesaing yang menguntungkan dirinya sendiri. Artinya, pemilih akan memilih calon yang dianggap memberikan jaminan manfaat bagi dirinya dan keluarganya, masyarakat tidak paham ke mana pasangan calon tersebut diusung atau asosiasi atau partai mana yang mencalonkan diri.

Ketiga. Pemilih yang tidak hadir atau tidak mempunyai hak pilih. Banyak warga negara yang tidak menggunakan haknya untuk memilih. Hal ini terlihat dari perkiraan dampak KPUD Rezim Bekasi yang menyatakan bahwa sekitar 39,1% oknum Pemerintahan Bekasi tidak melaksanakan haknya untuk memilih (Golput). Unsur-unsur ini dipengaruhi oleh pengorganisasian yang buruk, pengorganisasian yang buruk, misalnya alokasi alokasi yang tidak konsisten, ajakan terpisah yang membuat masyarakat enggan datang ke TPS, dan pemilih yang memilih untuk tidak memilih karena variabel pengambilan keputusan yang berkepala dingin. warga yang merasa tidak diuntungkan dengan akomodasi yang mereka tempati. pendatang baru yang ada. Pada Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2017, penelitian ini menemukan bahwa gerakan buruh yang diwakili oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik. Opini publik sebagian besar dibentuk oleh tuntutan akan pekerjaan yang lebih baik

Selain itu, kesimpulan penelitian ini juga menyoroti perlunya perhatian lebih lanjut terhadap peran gerakan buruh dalam politik lokal. Hasil ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan strategi politik yang lebih efektif, baik bagi kelompok buruh itu sendiri maupun bagi calon-calon yang mendapatkan dukungan dari mereka upaya advokasi, dan mobilitas pekerja massal.

Secara khusus, bantuan buruh terhadap pasangan Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono tampaknya belum mampu membawa pasangan tersebut berjaya. Meski mendapat dukungan, hasil Pilkada nampaknya lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti dinamika politik lokal, citra pasangan calon, dan isu-isu strategis.

Demikian pula, akhir dari eksplorasi ini juga mencakup perlunya perhatian lebih terhadap tugas pengembangan pekerjaan dalam isu-isu pemerintahan terkait. Hasil-hasil ini berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan strategi politik yang lebih efisien, baik bagi kandidat yang mendapat dukungan dari organisasi buruh maupun bagi kelompok buruh itu sendiri.



6.2 Saran

1. Menganalisis strategi kampanye Bambang Sumaryono dan Obon Tabroni dengan melihat bagaimana pesan mereka disampaikan kepada kelompok buruh. Bedakan apakah ada campur aduk antara pesan misi dan keinginan pekerja.
2. Adanya koordinasi yang lebih berhasil antara koordinat pendatang dan pertemuan pendukung, termasuk pertemuan kerja. Koordinasi ini dapat membantu dengan menghindari perasaan adanya ketidaksesuaian antara calon mitra kerja dan dukungan yang diberikan oleh pihak kerja.
3. Kelompok pekerja harus diberikan kekuasaan yang lebih besar sehingga mereka dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap agenda politik dan kebijakan. Pelatihan, advokasi, dan peningkatan kapasitas organisasi buruh adalah contohnya.
4. Berkonsentrasi pada hipotesis hubungan kekuasaan untuk memahami elemen kekuasaan antara pertemuan kerja dan penghibur politik lainnya. Mempertimbangkan bagaimana kekuatan politik lingkungan, pengaturan dan kepentingan keuangan berdampak pada kolaborasi antar buruh dan pesaing.
5. Menyampaikan hipotesis isu-isu publik untuk menyampaikan bagaimana isu-isu yang diangkat oleh kelompok kerja ternyata penting bagi rencana publik selama misi berlangsung. Berkonsentrasilah pada potensi isu-isu ini untuk mempengaruhi keputusan dan opini pemilih.